

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Brotodiharjo, R. Santoso. 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Fajar, Mukti. Achmad Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Gandawidjaja, Yanly, 2002, *Peran Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Dalam Proses Pendaftaran Tanah*, Universitas Parahyangan, Bandung.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta.
- _____, 2006, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan - Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- Hartanto, Andy, 2014, *Hukum pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar Hak atas Tanahnya*, Laksbang Justitia, Surabaya.
- Kamus Bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta.
- Marzuki, Peter .M, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadan Media, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2018, *Metode Penelitian Kanlitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho. Heru, 2001, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Parlindungan, A.P, 1998, *Komentar Undang – Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.
- Rahayu, Siti Kurnia, and Sony Devano. 2006, *Perpajakan Konsep, Teori, Dan Isu*. Kencana, Jakarta.
- Saidi, Muhammad. D, 2010, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sarwono, Sarlito W, 2009, *Psikologi Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta.

- Setiawan, I Ketut Oka. 2019, *Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sumarsan, Thomas, 2010, *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, Indeks, Jakarta.
- Suprianto, Edy. 2011, *Perpajakan Di Indoneisa*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Syahza, Almasdi, 2001, *Metodologi Penelitian Edisi Revisi Tahun 2021*, UR Press Pekanbaru, Riau.
- Tehupeiory, Aarjhe, 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Depok.

B. Jurnal Ilmiah :

- Abdul Mukmin Rehas, Sertipikat Sebagai Alat Bukti Sempurna Kepemilikan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Yuriska, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1 (No. 1), 2017.
- Aldi Sagita Hasibuan, Penangguhan Pembayaran Pajak Pph Dan BPHTB Sehubungan Dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peralihan Hak Jual Beli, *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Vol. 3 (No. 2), 2023.
- Androvaga Renandra Tetama, Politik Hukum Pendaftaran Tanah Elektronik Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, *Tunas Agraria*, Vol. 6 (No 1), 2023.
- Arifin Bur dan Desi Apriani, Sertipikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah, *UIR Law Review*, Vol. 1 (No. 2), 2017.
- Christiana Sri Murni, Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Peralihan Jual Beli Hak Atas Tanah, *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, Vol. 1 (No. 1), 2021.
- Dinne Diaren Dizan, Iwan Permadi, dan Hariyanto Susilo, Tanggungjawab PPAT Pengganti Terhadap Surat Kuasa Membebaskan Hak

Tanggungan Berobjek Izin Membuka Tanah Negara, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 12 (No. 3), 2021.

Farhad Chalid, Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Di Kecamatan Tukur Tahun 2017-2020, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 10 (No. 1), 2021.

Firdanada Ristriannisa dan Indah Prabawati, Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, *Journal Publika*, Vol. 10 (No. 2), 2022.

Gunanegara, Penyelesaian BPHTB Terutang Sertipikat PTSL Pasca UU No. 1 Tahun 2022, *Lex Jurnalica*, Vol. 19 (No. 2), 2022.

Hari Juliento W, Analisis Yuridis Pemungutan BPHTB Dan Pph Final BPHTB Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), *Indonesia of Journal Business Law*, Vol. 2 (No. 1), 2022.

Harris Yonatan, Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali”, *Negara Hukum*, Vol. 2 (No. 2), 2011.

Indriyani Soemantri, Herlina Herlina, dan Sri Mulyeni, Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Secara Online, *Jurnal Soshum Insentif*, Vol. 6 (No. 2), 2023.

Kamilah Wati Mohd dan Sharifah Zubaidah Syed Abdul Kader, Responding to Land Fraud: Should Torrens Compensation Scheme Be Introduced in Malaysia, *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, Vol. 7 (No. 11), 2022.

Masnah, Sampara Lukman dan Ali Hanafiah Muhi, Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Muaro Jambi, *Jurnal Renaissance*, Vol. 6 (No. 2), 2021.

Nurhayati dan Linus Erren, Kajian Hukum Terhadap Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 5 (No. 1), 2017.

Oktaviantin Intansari, Edith Ratna, Keotentikan Akta Pejabat Pembuat Akta Elektronik, *Notarius*, Vol. 16 (No. 2), 2023.

Rama Perkasa dan F.X Arsin Lukman, Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Merujuk Kepada PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Tanah,” JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), Vol. 6 (No. 3), 2022.

Rahmat Ramadhani, Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah, *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol 2 (No. 1), 2021.

Shavira Bonita P., Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), *Indonesia of Journal Business Law*, Vol 1 (No. 1), 2022.

Shirley Zerlinda Anggraeni dan Marwanto, “Kewenangan Dan Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik,” *Acta Comitatus*, Vol. 5 (No. 2), 2020.

Syska Lady S, Pengaruh PBB dan BPHTB Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Klaten, *Jurnal Riset Akutansi dan Keuangan*, Vol. 13 (No.2), 2018.

Yuliadi Idrus, M. Julkarnain, dan Rodianto, Prototype User Interface Cuti Pegawai Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sumbawa Berbasis Local Area Network (Lan), *Jurnal Informatika Teknologi Dan Sains*, Vol. 3 (No. 2), 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengolahan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017.

Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Pringsewu.

Peraturan Bupati Pringewu Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Dan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.